

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai 4 fungsi yang sangat fundamental bagi pembangunan suatu bangsa yaitu, mencukupi pangan dalam negeri, menyediakan lapangan kerja dan berusaha, penyedia bahan baku untuk industri dan sebagai penghasil devisa negara. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencarian dari mayoritas penduduknya. Sebagian besar penggunaan lahan di Indonesia diperuntukkan sebagai lahan pertanian (Dillon, 2004).

Pada era tahun 1980-an sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama yang mampu menjadi tumpuan bagi bangsa ini dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dimana kebutuhan pangan ini merupakan kebutuhan vital bagi setiap masyarakat. Sektor pertanian dapat mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri pada pertengahan tahun 1980-an. Dengan keberhasilan sektor pertanian di tahun-tahun tersebut, berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja. Akan tetapi keberhasilan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, diawal tahun 1990-an sektor ini mengalami fase penurunan, secara umum laju produksi pangan dan pertanian Indonesia mengalami perlambatan yang sangat signifikan (Situmorang, dkk 2012).

Sektor pertanian mampu memberikan kontribusi sebesar Rp. 434,48 triliun atau 14,57% terhadap PDB nasional pada tahun 2015. Sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor yang strategis dan potensial dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor pertanian juga akan mendorong masuknya investasi ke wilayah perdesaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran pertanian dapat menjadi sumber daya utama dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya di wilayah perdesaan (Buletin PDB Sektor Pertanian Triwulan IV, 2015).

Namun faktanya sebagian besar dari keluarga yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian merupakan keluarga miskin. Dari hasil laporan Tahun 2016 sebanyak 16,54 juta jiwa atau 59,06% dari penduduk miskin di Indonesia adalah

mereka yang berdiam di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian (Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2017).

Strategi pembangunan yang sesuai untuk negara agraris seperti Indonesia adalah menetapkan prioritas yang tinggi pada peningkatan produktivitas dan kualitas pertaniannya. Suka atau tidak, harus diakui bahwa tingkat produktivitas pertanian di negara kita memang masih rendah. Bukan karena petani kita malas, tetapi karena tidak efisien (Husodo, 2009).

Sektor pertanian di Indonesia belum mampu berdaya saing dalam dunia bisnis nasional maupun global yang merupakan awal dari upaya pengembangan ekonomi lokal. Menurut Setiawan (2008) banyak petani gurem di Indonesia dengan penguasaan lahan yang kecil yaitu hanya berkisar 0,25-0,5 Ha, kondisi ini terus terjadi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Sensus Pertanian tahun 2013 bahwa jumlah rumah tangga petani gurem tahun 2013 sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau sebesar 55,33 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan (Sensus Pertanian tahun 2013).

Pertanian di Indonesia yang didominasi oleh usaha skala kecil dilaksanakan oleh banyak sekali petani, yang sebagian besar tingkat pendidikannya sangat rendah yaitu, selama tahun 2012 – 2016 sekitar 33 – 42% hanya tamat SD dan 38% tidak sekolah/tidak tamat SD. Persentase kepala rumah tangga yang memiliki pendidikan tinggi (Akademi/perguruan tinggi) sangat kecil hanya sekitar 1,3%. Petani di Indonesia juga memiliki lahan sempit, bermodal kecil dan memiliki produktivitas yang rendah, kondisi ini akan berdampak kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global. Skala usahatani yang kecil pada umumnya belum mampu menerapkan teknologi maju yang spesifik lokal, hal ini akan mengakibatkan sulit dalam pencapaian efisiensi usaha dan mutu produk yang dihasilkan (Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2017).

Skala usaha yang kecil dan pengelolaan yang individualis membuat biaya produksi menjadi tidak efisien dan pendapatan petani selalu rendah, sedangkan di satu sisi petani harus dapat bersaing di tengah gempuran pasar modern. Keterkaitan dengan sektor ekonomi lainnya menjadi sulit dilakukan karena usahatani yang ada tidak memiliki kontinuitas, kualitas, dan kuantitas seperti yang diharapkan oleh pasar modern (Rakhma, 2010 *dalam* Anggita, 2012). Akibatnya,

petani di Indonesia terus berkubang dalam jeratan kemiskinan dan perekonomian perdesaan tidak berkembang.

Menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi dan suramnya peluang reformasi agraria (*land reform*) secara adil (terutama menyangkut hak kepemilikan lahan), maka petani kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan cara-cara lama, tetapi dituntut untuk terus meningkatkan daya saing, baik sisi penawaran (*supply side*) maupun sisi permintaan (*demand side*). Oleh karena itu mereka yang mayoritas berlahan sempit dan terpisah-pisah harus bersatu dalam satu ikatan kolektivitas (kerjasama) pengelolaan yang kuat untuk dapat memperbesar skala usahanya mencapai *economies of scale* yang diinginkan pasar modern. Jika tetap tidak, maka sudah dapat dipastikan mereka akan tersingkir dari persaingan yang semakin ketat di era globalisasi (Setiawan, 2008)

Gagasan bahwa luas usahatani setiap rumah tangga petani (RTP) perlu memenuhi *economies of scale* bukan suatu gagasan baru. Dibanyak negara didunia ada kecenderungan menurunnya jumlah petani dan bertambah luasnya daerah-daerah pertanian. Kecenderungan ini menghasilkan lahan garapan petani yang semakin luas. Penggunaan traktor dan alat/mesin pertanian yang lebih canggih dengan kekuatan diatas 250 HP menjadi semakin umum sehingga usaha pertanian lebih produktif dan lebih efisien. Di negeri Belanda sebelum perang dunia kedua, rata-rata para petaninya memiliki lahan pertanian seluas 10-15 hektar. Pada tahun 2009 rata-rata satu keluarga petani memiliki 70-100 hektar lahan pertanian. Gejala ini juga terjadi disemua negara yang pertaniannya maju. Kondisi yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Jumlah petaninya, walaupun secara persentase menurun tetapi secara absolut meningkat. Sementara itu luas lahan pertaniannya berkurang. (Husodo, 2009).

Perlu ditegaskan disini bahwa dalam membangun sektor pertanian memerlukan kondisi dicapainya *economies of scale* karena kondisi tersebut adalah syarat terjadinya peningkatan surplus ekonomi petani yang membuka jalan bagi terjadinya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Tanpa membangun produktivitas, efisiensi dan daya saing yang tinggi, kita tidak akan mampu menang dalam persaingan global, bukan saja di pasar internasional, tetapi juga di pasar dalam negeri sendiri (Husodo, 2009).

Melihat kondisi ini diperlukan adanya suatu gerak kolektivitas petani untuk dapat memperbesar skala usahanya. Penggabungan unit-unit ekonomi juga akan memberikan hasil yang lebih besar, lebih baik, atau lebih bermutu dibandingkan jika dilaksanakan secara terpisah. Adanya kolektivitas juga dapat mengefisienkan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan tentunya meningkatkan pendapatan petani (Yusdja dkk, 2004).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kolektivitas akan mampu mendukung pengembangan wilayah, khususnya di wilayah perdesaan. Kolektivitas mampu membuat usahatani Indonesia yang didominasi oleh petani gurem mencapai skala ekonomi yang diharapkan oleh pasar modern sehingga dapat berdaya saing dan mendorong masuknya investasi ke wilayah perdesaan (Yusdja dkk, 2004).

Kolektivitas dapat didefinisikan sebagai tindakan suka rela yang diambil oleh sekelompok orang untuk mengejar pencapaian tujuan bersama dalam kelembagaan kelompok tani (Rokhani dkk, 2012). Menurut Setiawan, (2008) kolektivitas dirasakan oleh petani lebih adil dan dipandang oleh para pakar penganut aliran strukturalis lebih humanis dan demokratis. Melalui model kolektivitas, petani kecil (*peasant*) dapat dengan mudah mengakses sumberdaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan usahatannya. Petani tidak perlu memikirkan bibit, modal untuk membayar tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, dan pasar. Secara teknis teknologi pertanian modern dapat diimplementasikan secara optimal, dan keseragaman pola tanam yang berperan dalam mengendalikan hama penyakit juga terjamin. Hal ini tidak terlepas dari peran kelompok dalam menerapkan metode partisipatif dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengontrol aktivitas usahatani. Kondisi ini sangat dirasakan oleh para petani kecil terutama yang berstatus sebagai penyakap.

Para pakar menganggap model ini sebagai terobosan baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di bidang pertanian terutama tanaman pangan (padi). Karena disamping jauh dari penimbunan kapital, juga karena lahir dari pemikiran petani sebagai pelaku utama di sektor pertanian. Secara sosiologismodel ini pun tetap akomodatif bagi para petani kecil yang berstatus

sebagai penyakap yang secara kuantitatif jumlahnya cukup signifikan (Setiawan, 2008).

Kolektivitas dapat diwujudkan oleh petani melalui kelembagaan petani. Kelembagaan merupakan salah satu komponen yang penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan usahatani yang dilakukan. Kelembagaan pertanian memberikan dampak terhadap kegiatan usahatani sampai pada pemasaran. Kelembagaan dapat meningkatkan produktivitas serta dapat mengurangi biaya produksi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Salah satu kelembagaan pertanian adalah kelompok tani (Sopian, 2014).

Kelompok tani memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat petani karena pada hakikatnya kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Semua orang berinteraksi dengan orang lain untuk bertahan hidup, maka akan ada suatu kegiatan mencari orang-orang yang mempunyai persamaan pandangan dan pemikiran untuk bekerjasama dan saling berinteraksi agar saling membantu dalam memecahkan suatu permasalahan. Setiap individu tersebut akan berperilaku mengelompok atau kolektif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara tidak langsung dalam hal ini telah terbentuk suatu komunitas sosial dimana kelompok sosial (kelompok tani) tersebut mempunyai tujuan yang sama (Purba, 2011).

Menurut Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (2016) dalam Wahyuni, (2016) menyebutkan bahwa kelompok petani yang telah tumbuh di Indonesia sebesar 523.439 poktan dengan jumlah Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) 297.520 gapoktan. Kelembagaan ekonomi petani yang berkembang di Indonesia berjumlah 14.579 dengan rincian 6.531 berbentuk koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebanyak 4.093 dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebanyak 1.264, sedangkan sisanya berbentuk badan usaha lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok tani yang berkembang dalam bentuk kelompok usaha bersama masih kecil (0.78%). Untuk itu, kelompok tani perlu diberdayakan dalam kelompok usaha bersama.

Menurut data Pusat Penyuluhan Pertanian (2015) dalam Wahyuni, (2016) menyebutkan bahwa kelembagaan ekonomi petani selama ini belum berfungsi sesuai dengan harapan, hal ini antara lain disebabkan karena: (1) Kelembagaan

petani belum berorientasi usaha produktif; (2) Akses terhadap kelembagaan keuangan/perbankan rendah; (3) Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan kapasitas petani dalam usahatani bagi anggotanya; dan (4) Kelembagaan petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar sehingga kelembagaan petani belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

B. Perumusan Masalah

Menurut Statistik Pertanian (2017), Sumatera Barat merupakan provinsi dengan jumlah kelompok tani terbesar kelima di Pulau Sumatera yaitu sebanyak 16.133. Berdasarkan informasi yang dicari dan survei pendahuluan yang dilakukan diketahui bahwa, dari sekian banyak kelompok tani yang ada hanya sebagian kecil yang sudah berusahatani secara kolektivitas. Hal ini dibenarkan oleh Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (2016) yang menyebutkan bahwa kelompok tani yang berkembang dalam bentuk kelompok usaha bersama (kolektivitas) masih kecil yaitu 0.78% dari 523.439 kelompok tani di Indonesia.

Dari informasi yang diperoleh dan survei pendahuluan yang dilakukan diketahui, bahwa diantara kelompok tani yang telah melakukan kolektivitas tersebut adalah Kelompok Tani Bina Bersama yang berlokasi di Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan Kelompok Tani Tuah Sakato yang terletak di Jorong Bulakan, Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan wilayah yang memiliki areal pertanian yang luas yaitu masing-masing 5.141 ha dan 61.977 ha yang dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Pada kedua wilayah ini juga terdapat banyak kelompok tani, di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 1.348 kelompok tani dan Kota Payakumbuh terdapat 277 kelompok tani (Buku Statistik SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani, 2017) (lampiran 1) .

Konsep dasar kolektivitas ditujukan untuk membangun kerjasama agar individu petani yang umumnya berlahan sempit dan kesulitan keuangan mampu menyediakan faktor produksi sesuai dengan yang dibutuhkan, lebih efisien dan

memiliki posisi tawar produk pertanian yang kuat dipasar sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan. Salah satu contohnya, para petani mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan. Mereka memiliki modal yang terbatas dan sulit mendapat tambahan modal dari perbankan maupun dari lembaga keuangan lain. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan faktor produksi, petani tidak punya pilihan lain selain meminjam modal kepada tengkulak. Para petani terikat perjanjian bahwa pada akhir musim tanam, seluruh hasil produksi harus dijual kepada pihak tengkulak dengan harga yang telah ditetapkan. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya posisi tawar produk pertanian disisi petani. Namun jika petani mampu menghimpun kekuatan dalam bentuk kolektivitas dalam kelompok tani, maka para petani akan mampu menata permodalan, penataan penggunaan faktor produksi agar lebih efisien dan mengurangi dominasi tengkulak dalam penentuan harga. Hal ini sangat menguntungkan bagi petani karena dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan efisiensi dan perolehan keuntungan yang layak dalam usahatani.

Hasil penelitian Yusdja, dkk (2004), menunjukkan bahwa kolektivitas dalam kelompok tani layak dilakukan karena dapat meningkatkan produksi sebesar 5-10 persen, meningkatkan keuntungan 18-30 persen, dan kesempatan kerja bertambah sebesar 20-30 persen. Penelitian yang dilakukan oleh Suwartapradja, (2008) tentang kolektivitas tenaga kerja dalam pertanian menunjukkan hasil bahwa kolektivitas yang dijalankan, apabila dikonversikan dapat menghemat biaya produksi sebesar Rp. 394.250,- setiap 0,1 Ha tiap musim, atau setara dengan penghematan rata-rata Rp. 3.755,- tiap hari selama satu musim.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas terdapat berbagai manfaat yang bisa diperoleh petani melalui kegiatan kolektivitas. Kondisi ini perlu dilakukan kajian mendalam, supaya dapat disimpulkan dan diinformasikan bagaimana teknis pelaksanaan kolektivitas dalam kelompok tani serta memaparkan secara jelas bahwa kolektivitas dalam kelompok tani memang akan memberikan banyak manfaat dalam berusahatani. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Kajian Kolektivitas Pada Kelompok Tani Bina Bersama Dan Tuah Sakato”.

Maka dirumuskan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kolektivitas pada masing-masing kelompok tani?
2. Bagaimana kinerja kolektivitas pada masing-masing kelompok tani?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kolektivitas dalam kelompok tani?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kolektivitas pada masing-masing kelompok tani.
2. Mengetahui kinerja kolektivitas pada masing-masing kelompok tani.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kolektivitas dalam kelompok tani.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Bagi kelompok tani diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi sekaligus bahan masukan atau pertimbangan dalam membuat keputusan untuk pemilihan kegiatan kolektif demi pengembangan usahanya dimasa yang akan datang. Selain itu juga berguna bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari bagaimana gambaran umum mengenai manfaat kolektivitas dalam kelompok tani. Dan juga memberikan tambahan literatur berupa sumbangan perbendaharaan ilmu pengetahuan, khususnya bagi para peneliti yang akan meningkatkan pengetahuannya dalam bidang kolektivitas. Bagi penulis, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.